

Implementasi Kebijakan *One Tambun One Product* dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Natam Provinsi Yala Thailand

Arsoowan Laeha

Magister Kebijakan Publik, Departemen Administrasi, FISIP UNAIR.

Abstract

This thesis aims to describe the policy implementation One Tambun One Product (OTOP) in the occasion of community participation in sub-district Natam Yala province Thailand. and to describe the factors that affect the implementation of the OTOP policy in order to increase community participation. in this research uses qualitative research. Which aims to describe a situation or phenomenon in sub-district Natam Thailand OTOP groups in implementing OTOP policy. In this case the researchers will collect data from interviews, recording, wibside, and documents.

Of a results of the research showed that there are two factors that affect the implementation, namely: 1. Effect of support, namely a) Resource is a decisive step towards producing. Help from government officials and the number of participants was sufficient to process the project in accordance with Chips. b) Communicatoin is a step advertises policy. c) Disposition is a step determine towards producing. the sincere and qualified staff in the leadership that has been executed well, 2. The influence of obstacles, namely. a) Resource is a step to develop quality products. b) Communication is a step in the marketing expansion. communication in marketing is not in line with the two parties outlining the traders and workers groups. In conclusion OTOP policy implementation in sub-district Natam there are 2 factors that is very influence the inhibitory effect of support and influence. So with the obstacle at the stage in the process of how it come the failure to exercise it.

Key Words: Implementation, participation, OTOP policy

Pendahuluan

Kemajuan di negara Thailand, terletak pada perubahan di bawah rencana kemajuan ekonomi dengan melalui kebijakan-kebijakan tertentu, dari hasil kemajuan yang lalu pada akhir rencana kemajuan ekonomi yang kedelapan ternyata ekonomi di Negara Thailand meningkat lebih tinggi, karena hasil pendapatan masyarakat meningkat sampai 26 kali

lipat, yaitu dari 58,900 juta bath (Satu baht sama dengan tiga ratus rupiah) tahun 1962 meningkat jadi 1,574,649 juta bath dalam tahun 1991. Hasil pendapat masyarakat tahun 1962 masih di 2,150 bath perorangan/tahun, meningkat jadi 27,949 bath perorangan/tahun dalam tahun 1991, jumlah kemiskinan pada tahun 1999 mengurangi sehingga 13.7 persen. (Majalah office of the national economic and social development board. 2002;h3).

Bagaimanapun, masih tetap ada kebijakan yang gagal. salah satunya, kebijakan *Kontun Muban* (modal desa). Adalah kebijakan masa

pemerintah Thaksin Chinawatra pada babak pertama tahun 2000, dalam rangka memperkuat kemandirian desa dan masyarakat dalam pengembangan inisiatif. Memperbaiki masalah kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat di desa. Dengan cara kasi uang berjumlah 1,000,000 baht perdesa. Desa mengurus sebagai menajmen sendiri secara sistem *money Circulating* dalam desa, harapan pemerintah terhadap desa dengan adanya satu modal bisa membangun ekonomi apapun yang masyarakat suka, dan modal itu tetap bisa gantian kepeda orang lain setelah orang pertama itu berhasil, sehinga masyarakat semua sudah bisa mandiri, modal 1,000,000 baht itu harus kembali pada akhir nanti. Setelah kebijakan ini berjalan hampir seluruh desa di Thailand tetapi kebijakan ini gagal. Dalam penelitian Charif Ponpan, meneliti studi kasus 52 desa dapat kesimpulannya :

1) Modal desa sudah disetujui bisa di penjam. Kenyataannya, ada 2 desa atau 3.8 persen yang belum setuju untuk dipenjam, dan

29 desa atau 55.8 persen sudah disetujui meminjam semua 1 juta Bath perdesa, 13 desa atau 25.0 persen disetujui tapi dalam jumlah uang 900,001-999,999 Bath, 8 desa lagi sedang dalam proses. Untuk modal perdesaan itu hampir semua desa sudah dapat disetujui peserta (penduduk desa yang ikut kebijakan ini) meminjam.

2) Proyek atau aktivitas yang disetujui dan jumlah uang dipinjam. Kenyataannya, disetujui peserta meminjam bermacam-macam proyek/aktivitas, kebanyakan dalam sisi pertanian yaitu 92.3 persen (48 desa), sisi jualan dan Industri 67.3 persen (35 desa). Dalam proyek/aktivitas kenyataannya, proyek pertanian yang tertinggi jumlah uang disetujui, yaitu 43.6 persen dari modal satu juta Baht itu di guna untuk pertanian (21 desa) dengan disetujui meminjam dalam jumlah uang 300,001-600,000 Baht, dan 29.2 (14 desa) dengan disetujui meminjam dalam antara jumlah uang 600,001-900,000 Baht, dan untuk proyek selain dari itu disetujui meminjam dalam sekitar jumlah uang 300,000 Baht.

3) Batasan waktu peminjaman. Adalah harus kembali uangnya dalam waktu setahun, kenyataannya 15.2 persen (52 desa) kembali tepat waktu, 25.3 persen kembali dengan tidak tepat waktu, 50.5 persen belum kembali karena peminjam tidak bisa memanfaatkan uang sebagai modal, yang bisa kembali itu (15.2 persen) rata-rata uang dari sisi lain dan 25.3 persen berusaha kembali dengan cara kredit soalnya uang itu sebagai hutang, dan peminjam yang tidak bisa kembali (50.5 persen) dengan alasan tidak ada hasil dari uang itu, karena penduduk di desa susah nyari hasilan, mereka sudah terbiasa bisa hidup nyari pagi makan petang, apa lagi jumlah uang mereka berhutang itu besar, kesimpulannya penduduk desa yang miskin tambah berhutang kepada Negara. (Charif Ponpan, 2002;h94-96).

Pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Thaksin Chinawatra menentukan kebijakan, ungkap di perlemen pada tanggal 26 januari 2004 dalam perkenaan mengatasi kemiskinan, dapat menentukan strategis dalam membangun ekonomi Thailand dengan berkualitas, berstabilitas. Yaitu, perhatian terhadap keseimbangan antar pembangunan ekonomi tingkat hubungan ekonomi dalam

Negara dan luar Negara, untuk mengetahui ekonomi dunia sekarang seperti apa? jauh mana kemajuannya? di dalam keadaan sistem ekonomi liberalisasi. Oleh karena inilah, pemerintah mengadakan kebijakan secara cepat berharap bisa mengatasi kemiskinan yakni kebijakan *One Tambun One Product* OTOP (*Tambun* itu sama dengan Kecamatan di dalam bahasa Indonesia, jadi setiap *Tambun* memproduksi sesuatu yang bisa menunjuk identitas masing-masing dan bisa di jual di pasar-pasar) kebijakan ini tidak lain tidak bukan hanya membinakan kerja, membinakan kehasilan yang baik, dan membinakan kesempatan-kesempatan rakyat khususnya penduduk desa supaya pembangunan ekonomi dasar dengan melalui kebijakan OTOP dengan cara satu *Tambun* satu produk dari masyarakat sendiri (Bottom-Up), bersamaan bimbingan dari pegawai negeri dan swasta sehingga masyarakat bisa mandiri, sesuai penduduk mau produksi apa pun dengan melalui musyawarah, anggarannya dari pemerintah secara kredit tergantung keperluannya dengan ada batasan. (www.thaitambon.com)

Setelah menjalani, kebijakan OTOP ini rakyat dapat kesempatan punya kerja, dan hasil pendapatan rakyat meningkat lebih tinggi. Lihat data-data laporan hasil penjualan produk OTOP, departemen pengembangan masyarakat melaporkan kepada *Krak suang mahathai* (kementerian dalam negeri). Adalah, hasilan penjualan OTOP dalam tahun 2004 berharap jualan dapat keuntungan 10,900 juta bath menjual dapat 16,800 juta bath, dalam tahun 2005 berharap jualan dapat keuntungan 20,000 juta bath menjual dapat hanya 17,500 juta bath. Membuktikan secara umum kebijakan ini berhasil, tetapi dengan secara halusinya masih ada desa-desa yang tidak menjalaninya atau menjalani berapa bulan berhenti, masalah ini mungkin saja karena kebijakan ini harus bentuk kelompok, jadi peserta dari masing-masing desa pasti ada perbedaan dan lagi juga secara bentuk kelompok ini sebagai cara terbaru bagi masyarakat desa, menurut Surat Sisanga untuk menjalani proyek dengan bentuk kelompok harus di utamakan partisipasi antara sama lain. (www.thaitambon.com)

Di *Jangwat Yala Muang Yala Thailand* (*Jangwat* dibahasa Indonesia iyalah Provinsi, *Muang* adalah Kota) ada kelompok yang mengikuti kebijakan OTOP berjumlah 16 kelompok. Yaitu, *Tambun Sateng, Tambun Budi, Tambun Yopo, Tambun Lidon, Tambun Yala, Tambun Thasap, Tambun Lammai, Tambun Natam, Tambun Lamphaya, Tambun Poseng, Tambun Phron, Tambun Bannan gsareng, Tambun Satengnok, Tambun Tase*, hasil implementasi kebijakan OTOP yang telah lalu ada kelompok Ibu-Ibu di Kecamatan Natam Provinsi Yala memproduksi kerupuk buahan gagal, penduduk di kapupaten ini terdiri dari dua agama yaitu Islam dan Buddha, pasti budaya selalu berbeda. (Majalah perbulanan Provinsi Yala. 2010;29-30) Oleh karena ini, cukub tertarik meneliti implementasi kebijakan *One Tambun One Product* dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
- b. dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan tersebut, maka tujuan dari penelian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi pendahuluan bagi penelitian serupa dimasa mendatang atau sebagai perbandingan dari sudut pan-

dang yang berbeda, khususnya yang mengikut tentang implementasi kebijakan *One Tambun One Product* (OTOP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi/gambaran yang lebih nyata tentang implementasi *kebijakan One Tambun One Product* (OTOP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta factor-faktor yang mempengaruhinya. a) Bagi Pemerintah Daerah kecamatan Natam untuk memberi dukungan pada kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi staf. b). Bagi masyarakat *Tambun Natam* dan yang lain mengharapkan hasil atau keuntungan bertambah makin baik.

Kerangka Konseptual

Konsep OTOP

OTOP pertama kali diterapkan di kota kecil Oita di Jepang dengan istilah *One Village One Product* (OVOP). Di Thailand mengadopsi OVOP dengan nama *One Tambon One Product* (OTOP) pada dasarnya adalah suatu konsep atau program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Pengertian kawasan dalam hal ini bisa meliputi suatu area wilayah dengan luasan tertentu seperti wilayah *Tambun*. Secara konseptual, model OTOP maupun OVOP identik dengan konsep *Agro-Ecological Zone* (AEZ) atau Perwilayahan Komoditas Unggulan yang juga mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis komoditas pertanian dan industri unggulan.

Konsep OTOP atau *One Tambon One Product*, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah (*regional development*) di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya local.

Teori Implementasi

Menurut teori implementasi George Edward III (Agustino.L 2008;149) dalam uraiannya tentang implementasi kebijakan publik dengan teorinya *Direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variable adalah :

1. Komunikasi: merupakan factor yang dianggap penting karena suatu program hanya dapat ditata dengan baik apabila jelas bagi pelaksananya. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan hal ini dapat dilakukan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi bisa dikomunikasikan pada staf yang tepat.
2. Sumberdaya: dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelasnya ketentuan dan peraturan, serta akuratnya penyampaian kebijakan tetapi bila personil yang bertanggungjawab kurang mempunyai sumberdaya yang berkualitas dipastikan implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Jika ingin efektif dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan tetapi harus juga memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya sehingga tidak terjadi kebiassan dalam praktiknya.
4. Struktur birokrasi, Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur organisasi.

Dari teori yang telah disampaikan diatas sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Disposisi, Sumber daya, dan Struktur birokrasi. Dalam hal ini penulis akan mengadopsi variabel bebas dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan. Selanjutnya, dalam pemecahan indikator (breakdown indicator) tentang implementasi

nantinya akan di adakan modifikasi teori dari George C. Edwar III. Dengan demikian, hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

Metode Penelitian

Menurut Koentjaraningrat Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena di masyarakat *Tambun* (Kecamatan) *Natam Thailand* dalam mengimplementasi kebijakan OTOP (1981) penelitian diskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di *Tambun Natam Jawat Yala Thailand*, pemilihan *Tambun* ini adalah karena sering terjadi kegagalan dalam mengimplementasi kebijakan dan *Tambun* ini salah satu terletak di wilayah konflik jadi menakuti pemerintah pusat untuk cek atau membantu segala macam, cukup menarik untuk meneliti di lokasi ini.

Penilaian informan lebih didasarkan pada kualitas informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya pemilihan informal ditentukan didalam pertimbangan situasi fenomena yang dianggap terlibat langsung yang mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan kebijakan OTOP.

Teknik pengumpulan data Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif selain sebagai perencana sekaligus juga sebagai pelaksanaan pengumpul data atau sebagai instrument dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam menggali data adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu rekaman agar data yang diperoleh tidak terdapat kesalahan dalam pengolahannya.

Disamping wawancara mendalam sebagai sumber data primer, peneliti juga mengandakan data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber yaitu dokumen, internet, hasil penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang di kaji.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung sampai pada akhir penelitian atau penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif (Iskandar, 2009:22) dilakukan melalui empat kegiatan utama, yaitu : pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data kualitatif ini dilakukan dalam tiga tahapan.

Tahap pertama, tahap pengumpulan. Pada tahap ini data-data yang terkumpul di lapangan dalam bentuk rekaman ditranskrip ke dalam bentuk Tulisan. Transkrip dilakukan secara bertahap dan dilakukan setiap kali peneliti selesai melakukan wawancara dengan informan. Tahap kedua, tahap ini reduksi data. Pada tahap kedua ini data wawancara yang telah ditranskrip kemudian dipilih dan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang ada. Tahap ketiga, tahap analisis. Pada tahap ini data yang telah terkumpul dan pilih berdasarkan kategori yang ada dianalisis dengan teori.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan penelitian implementasi kebijakan OTOP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan. Dari hasil pengamatan selama melakukan penelitian di lapangan maka kenyataan implementasi kebijakan OTOP di *Tambun Natam* Provinsi Yala Thailand ada lima tahapan, dan ungkapan informan sebagai penjelasan setiap tahap pada wawancara tentang implementasi kebijakan OTOP di *Tambun Natam* terdapat beberapa faktor yang menyebabkan aktivitas memproduksi kerupuk di *Tambun Natam*, diambil hanya faktor yang mempengaruhi aktivitas ditahap tertentu. Seperti berikut :

1. Langkah mempelajari kebijakan.

a. Faktor komunikasi. Indikator yang diteliti meliputi bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kebijakan OTOP, dari hasil wawancara didapatkan bahwa- masyarakat semua memahami tentang kebijakan OTOP dan staf

sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan dilakukan sosialisasi pada masyarakat umum tentang kebijakan OTOP. Seperti yang dikutip berikut :

“ Saya kerja di luar kota dan hari kerja saya senin-jumaat tidak sempat untuk mengikuti meeting, setiap kali meeting adanya diantara hari itu, seingat saya satu kali aja mengikuti meeting kebetulan hari itu saya libur (izin sakit apa gitu), walaupun saya tidak sempat tapi saya memahami dan mengerti melalui media acara suara desa sabtu-minggu DJ Sebai-Sebai Kacamatan Natam” (Ropisah Jekmak. 4 Februari 2013)

b. Faktor Disposisi. Indikator yang diteliti meliputi bagaimana komitmen pelaksana yang diberikan pimpinan oleh staf yang berhubungan dengan kebijakan OTOP sejauh mana tingkat keikhlasan dan kepatuhannya dalam melaksanakan tugas, termasuk tentang sosialisasi kebijakan OTOP pada masyarakat di *Muban* (desa-desa) *Tambun Natam* didapatkan bahwa para staf tulus hati dan berkualitas dalam pimpinannya agar sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan dilakukan sebagai satu tugas mereka sama ada di sisi teknik, dan sebagai konsultan untuk proyek OTOP dengan cara khususnya dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

“..Staf sering mengadakan rapat untuk diskusi dan memberi informasi tentang kebijakan OTOP sampai kami paham dan mengerti, Mengiklankan kebijakan sangat jelasnya ketentuan dan peraturan, serta akuratnya penyampaian kebijakan pada masyarakat dengan baik ,dan masyarakat sendiri juga menerima dan mengerti pada kebijakan OTOP yang baik dan serta menyebar orang lain, dipastikan implementasi kebijakan akan berjalan efektif. biasanya mereka datang hari kerja maka kami tidak bisa mengadakan rapat pada hari saptu dan minggu padahal hari itu masyarakat malah libur dirumah..” (Maroyik Masea, Camat. 6 may 2013)

Pendapat diatas diperkuatkan dengan pendapat informan dari peserta kelompok berikut ini:

“ kami senang kok sama pegawai itu, mereka sering ke tempat kita, bicaranya sambil tersenyum trus gitu. Senang-senang! Saya yakin banget mereka perhatian, serius ma proyek kita walaupun mereka datang hanya dalam waktu kerja saja, merika selalu menawarkan cara-cara mengembangkan produk kerupuk sejauh mugin, dan setiap kali datang menanya terus tentang sejauh mana jualan kami. (Vimala Habanrat, Pemasaran. 1 May 2013)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa komunikasi dan disposisi staf mempengaruhi dukungan dalam mengiklankan informasi kebijakan OTOP pada masyarakat untuk mengimplementasi dengan efektif dan efektivitas.

2. Langkah menentukan arah produksi

Faktor Struktur birokrasi. Indikator yang diteliti meliputi bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksana yang berbentuk organisasi. Kenyataannya peserta membentuk satu organisasi dan bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, manajemen organisasi mengikut secara struktur birokrasi.

3. Langkah mengembangkan kualitas

Sumberdaya. Dalam langkah mengembangkan kualitas produk tidak berkembang sama sekali soalnya sumberdaya lingkungan tidak sesuai dengan yang kehendaki peserta, sama ada alat-alat memproduksi kurang lengkap dan yang punya juga standarnya tidak seberapa baik, tidak punya kendaraan untuk mengirim produk sebagai miliki khusus kelompok sehingga membuat motivasi peserta menurun, partisipasi peserta juga menurun dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

“pada dasar peserta kelompok kami dari dua budaya partisipasinya sulit sekali tetapi kami bisa saling mengerti, ditahap mengembang kualitas produk tidak berubah apa-apa kok karena salah satunya alat-alat tidak lengkap, kendaraan untuk mengirim tidak ada, modal tidak mencukupi untuk mengembang apa-apa karena ini kami jadi putus motivasi dalam kerja

benruk kelompok, dan keruntuhan partisipasi kami cepat banget dengan gara-gara dua budaya..” (Marini Samok. 4 may 2013)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa lengkapan alat-alat untuk memproses produk belum siap dan tanpa kendaraan secara khusus untuk mengirim produk kepasar menyebabkan motivasi dan partisipasi peserta menurun karena ada hambatan sedikit terkait dengan anggaran. Jadi sumberdaya ini maupun peserta atau lingkungan menjadi hambatan dalam mengembangkan kualitas produk. Selain itu, faktor sosial budaya juga menjadi hambatan dalam mengembangkan kualitas produk, pada dasar peserta dari dua agama dua budaya sulit dipahami dengan halussi apabila ada masalah cepat partisipasinya menurun.

4. Langkah ekspansi pemasaran

a. Faktor Komunikasi. Ekspansi pasar adalah hal mutlak yang terjadi saat bisnisnya semakin berkembang. Adakalanya, bisnis tidak berkembang maka tidaklah berkembang pasar. Indikator yang diteliti meliputi bagaimana ekspansi pasar dalam pelaksana proyek OTOP. Di dapatkan bahwa ekspansi pasar tidak berkembang soalnya ditahap berkembang kualitas produk itu tidak mengembangkannya. oleh karena itu, mempengaruhi pada komunikasi pemasaran dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

“...produk tidak bisa berkembang, susah dalam komunikasi pada pasar apabila Meaka (pelanggan) bertanya tentang produk baru sama ada rasanya, rupanya, harganya, kami diam saja). Meaka bilang di pasar sudah banyak bermacam kerupuk banyak saingan jadi produk kamu harus berkembang jangan tetap seperti itu terus. Kami tahu kok Meaka mau seperti apa tetapi kami tidak bisa seperti dia mau soalnya kami belum siap disegi perkembangan produk, dan dalam kendaraan khussus, dll. (Ranuth Manak, marketing)

Ungkap tambahan oleh seorang Meaka (pedagang) dapat dilihat kutipan berikut :
“...Kalau di tempat jualan saya sekarang banyak jenis kerupuk dari pabrik biasanya

pabrik itu ikuti proyek OTOP juga, akhir-akhir ini kerupuk desa Natam kurang laris. Dulu saya membeli langsung tapi akhir-akhir ini saya hanya terima titipan jual saja, saya pernah bilang kepada mereka harus sering berkembang produk mengikuti pemasaran. Mereka bilang ok-ok didepan setelah itu produk seperti kemarin lagi deh, mokin komunikasi kami tidak nyambung ” (Ratwan Jekseni, pedagang. 1 may 2013)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa komunikasi di pemasaran tidak sejalan dengan menguraikan dua pihak yaitu pedagang dan petugas kelompok. Sedangkan Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Didapatkan komunikasi pemasaran menjadi hambatan rencana komunikasi perusahaan, maka terjadi proses komunikasi akan berjalan dengan tanpa efektif dan efisien.

5. Langkah evaluasi

a. Faktor struktur birokrasi. Struktur birokrasi pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu ketat dan menjaga kestabilan organisasi dibawahnya oleh karena itu peserta berharap bahwa pegawai negeri melaksanakan evaluasi dengan baik dapat dilihat kutipan ini:

“proyek kami dievaluasikan oleh pegawai negeri dari provinsi dan bergabung dengan peserta kami. Biasanya pegawai datang disini sambil berjanji hari apa untuk mengevaluasi setiap langkah-langkah dengan bersama. Demikian, evaluasi berjalan oleh pegawai, mereka kerja didalam control pihak atasan. Jadi, evaluasi proyek kami salah satu peran mereka pasti melakukannya sebagai proses menjelaskan, memperoleh dan menyediakan data yang berguna untuk menilai alternative keputusan

untuk berkembang proyek kami lagi.” (Laila Laeha, ketua kelompok. 4 Februari 2013)

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Maka **tergantung** pengevaluasi dari organisasi yang manajemen struktur birokrasi sangat ketat dan punya pengalaman cukup banyak. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa struktur birokrasi pemerintah menjadi pengaruh dukungan dalam mengevaluasi proyek OTOP tersebut.

Hasil wawancara di atas diperoleh yang di ambil dari model implementasi George Edward III pada peserta kelompok, pegawai negeri, pedagang, melalui wawancara yang dilakukan untuk menganalisis mengetahui apakah variable tentang Komunikasi, Struktur birokrasi, Disposisi dan Sumberdaya yang ada di model implementasi George Edward III pada setiap langkah. Penelitian menjelaskan dan memilih variable di setiap langkah hanya variable yang mengaruhi terhadap langkah-langkah tertentu.

Selain variable dari model implementasi George Edward III penelitian mendapatkan setelah wawancara bahwa faktor sosialbudaya dan ekonomi menjadi pengaruh dalam mengimplementasi kebijakan OTOP di *Tambun* Natam. Adalah :

a. Faktor sosiobudaya. Faktor Sosiobudaya yang menganut hari-harian pasaran terkadang mereka membatasi untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai, karena kepercayaan sangat membatasi. Untuk di *Tambun* ini terbagi menjadi dua kepercayaan Islam dan Budha berarti terbagi dua grup yang besaran, dengan demikian mereka harus upaya untuk memahami searah walau tidak cocok seberapa penuh hati tetapi demi kelompok dan demi dapat uang subsidi dari pemerintah harus memaksa diri untuk setuju. Seperti yang dikutip dari informan beragama Buddha berikut :

“...Kami tentu saja suka memproduksi yang lebih mudah bahannya yang di cari dan juga

harga murah apa lagi konsumen juga bayar yang di sukai. Yaitu memproduksi apapun dari daging babi soalnya hampir setiap rumah memeliharanya, saya mengira orang-orang menyukainya dan di pasar juga jarang ada produk olahan dari daging babi pasti laris. Tetapi saudara kita Muslim mereka tidak bisa menerima, kami bukan kalah dalam musyawarah hari itu malah yang ikut hari itu banyak teman-teman Buddha waktu angkat tangan sebagai demokrasi banyak pihak kami. Yang setuju memproduksi kerupuk itu demi kesejahteraan searah, persahabatan kelompok dan untuk mendapat uang subsidi kebijakan OTOP dahulu karena kebijakan ada waktu proses tertentu.”

(Laila Laeha, ketua kelompok. 4 Februari 2013)

b. Faktor ekonomi. Masyarakat di *Tambun Natam* khususnya peserta kelompok sudah punya kerja yang dapat hasil harian. Ialah, hasil dari kerja perkebunan yang jelas dapat hasil perharian dari kepun karet apa lagi akhir-akhir ini harganya cukup tinggi, kerjaan mereka rata-rata mulai dari jam lima pagi sampai jam sebelas siang setelah itu santai sama anaknya atau berjalan-jalan, mereka tidak perlu menyari kerja sebagai tambahan, jadi menyebabkan kurang serius terhadap implementasi kebijakan OTOP. Seperti yang dikutip dari iforman di *Tambun Natam* berikut:

“...Pabrik kerupuk yang kurang berjalan itu tidak lain tidak bukan adalah peserta tidak serius. sudah ada kerja peribadi apa lagi dapat hasil sudah lumayan, apa lagi sekarang harga karet cukup tinggi, ngapain nyari capek lagi. Kebijakan itu ada subsidi dari pemerintah mau cuba berjalan saja mudah-mudahan berhasil kalau tidak ya sudah, juga tidak merugi apa-apa, dan itu juga kesempatan kita kalau kita tidak sanggup menjalani kebijakan itu nanti uang sebagai subsidi akan beralih kekecamatan lain.” (Paji Ismael Doloh, konsultan. 4 May 2013)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa peserta terdapat dari dua agama yaitu Islam dan Budha berarti dua budaya. Dua budaya ini walaupun langkah pertama implementasinya dengan mencari solusi bersepakat dengan baik,

sejatus resolusi memproduksi kerupuk buahan itu karena bertujuan mendapatkan jumlah uang subsidi dari pemerintah yang tertentu. Pada dasar mereka memiliki budaya berbeda, kekerasan dalam ide-ide masih tetap berselisih didalam langkah berikut. Adapun ekonomi di *Tambun Natam* rata-rata dari perkebunan dan pada umumnya peserta tidak butuh uang, semua sudah punya kerja pribadi hasilnya perharian lumayan tinggi jadi menimbulkan ketidak serius menjalani kerja tambahan apa lagi berbentuk kelompok dan ada masalah dalam implementasinya. Maka tidak bisa menolak bahwa sosiobudaya dan ekonomi masyarakat mempengaruhi hambatan dalam implementasi kebijakan OTOP.

Simpulan

Dalam implementasi kebijakan OTOP di *Tambun Natam* Provinsi Yala Thailand bukan hanya faktor-faktor teknis implementasi yang sangat berpengaruh pada hasil akhirnya (sumberdaya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sebagaimana yang diindikasikan dalam teori/model implementasi kebijakan dari Negara barat), namun juga faktor lingkungan berpengaruh pada implementasi kebijakan masyarakat, iyalah ekonomi dan budaya menggoda masyarakat dalam melaksanakan proyek.

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh kesimpulan dari berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi diperoleh kesimpulan kepada dua bagian yaitu, 1. Pengaruh dukung, 2. Pengaruh hambatan, seperti berikut.

1. Dukungan adalah :

a. *Sumberdaya* : Di langkah menentukan arah memproduksi. Pertolongan dari petugas pemerintah dan jumlah peserta sudah mencukupi sesuai dengan proyek mengolah kerupuk.

b. *Komunikasi* : Di langkah mengiklankan kebijakan. Sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan pernah dilakukan sosialisasi dari pegawai negeri pada masyarakat secara umum tentang kebijakan OTOP, dan setelah itu mengikut peduli sebagai staf sejak awal sampai akhir.

c. *Disposisi* : Di langkah menentukan arah memproduksi. Para staf tulus hati dan berkua-

litas dalam pimpinannya agar sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan dilakukan sebagai satu tugas mereka sama ada di sisi teknik, dan sebagai konsultan untuk proyek OTOP dengan secara khusus. Sebaliknya kepatuhan peserta kelompok pada staf dan pada putusan musyawarah cukup mengimplementasi kebijakan dengan metaati apa keputusan musyawarah yang baik.

d. *Struktur birokrasi* : Di langkah menentukan arah memproduksi, indikator menentukan planning kerja. Seluruh petugas di kelompok termasuk staf telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan implementasi kebijakan OTOP sesuai dengan tupoksi yang ada, namun meski sudah ada kemudahan dalam prosedur proses dan partisipasi berbentuk kelompok terkadang peserta sendiri pada akhir-akhirnya tidak serius dalam menjalaninya kepentingan individu dalam waktu bertugas munculnya kekurangan partisipasi.

2. Hambatan

a. *Sumberdaya* : Di langkah mengembangkan kualitas produk. Alat-alat untuk memproses kualitasnya kurang begitu bagus dan tempat proses juga masih menggunakan ruang belakang rumah pesertabelum punya sebagai khusus kelompok.

b. *Komunikasi* : Di langkah ekspansi pemasaran. Komunikasi di pemasaran tidak sejalan dengan menguraikan dua pihak yaitu pedagang dan petugas kelompok. Sedangkan Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar.

Selain variable dari model implementasi George Edward III penelitian mendapatkan setelah wawancara bahwa faktor sosialbudaya dan ekonomi menjadi pengaruh hambatan dalam mengimplementasi kebijakan OTOP di *Tambun Natam*.

Daftar Pustaka

Agustino.L (2008) *dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta Bandung

Iskandar (2009) *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kualitatif dan kuantitatif)* GP press. Jakarta

Islamy, M.T (1997) *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara. Jakarta

Majalah perbulanan Provinsi Yala. (2010) *laporan dan kesimpulan kebijakan OTOP*. Yala

Pandumen implementasi kebijakan OTOP (2009). *Departemen Pengembangan Masyarakat Ke menterian Dalam Negeri*. BKK

Ponpan Charif (2002) *Evaluasi kebijakan modal satu juta baht perdesa : studi kasus 52 desa*. University Yala Rajpat